



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4117/SEK/PL1.1.7/XII/2023 Jakarta, 21 Desember 2023
Sifat : Terbatas
Hal : Percepatan Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
Tahun Anggaran 2023

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Urusan Administrasi;
2. Para Sekretaris Ditjen Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Para Sekretaris Badan di lingkungan Mahkamah Agung;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
di -
Tempat

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 terkait dengan tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA), Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi atas beberapa paket pengadaan konstruksi yang berpotensi tidak tercapai target progres pelaksanaan kontrak konstruksi sesuai dengan target anggaran di tahun anggaran 2023.

Untuk itu, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu melakukan percepatan atas pelaksanaan kontrak konstruksi dengan langkah-langkah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahamannya terkait dengan hal-hal teknis dan non teknis yang berada dalam dokumen kontrak sesuai dengan pasal 4 Surat Perjanjian;
2. Melakukan pengendalian sesuai dengan dokumen kontrak;
3. Melakukan addendum kontrak jika dibutuhkan, terutama untuk percepatan pelaksanaan kontrak;
4. Mengajukan kepada penyedia konstruksi untuk mempergunakan material, teknologi dan metode kerja yang mempercepat pelaksanaan kontrak;
5. Bersama-sama dengan penyedia jasa untuk menyusun dan menjalankan langkah-langkah yang terukur guna percepatan pekerjaan;
6. Melakukan pengawasan secara berjenjang untuk memperoleh hasil pembangunan sesuai dengan kontrak; dan
7. Berkoordinasi dengan Biro terkait pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan melaporkan progres pekerjaan secara berkala.

Demikian disampaikan untuk segera dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung,
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.